

**EVALUASI KERJA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2015  
(Studi Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat)**

**Oleh**

**DINA ANDRIANA  
NPM : 12.851.0053**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPEREMINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**EVALUASI KERJA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN TAHUN 2015**

**(Studi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kelurahan Hinai  
Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

**Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**

**DISUSUN  
OLEH :**

**DINA ANDRIANA**

**NIM : 12.851.0053**

**PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : **EVALUASI KERJA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2015 (Studi Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kelurahan Hinai kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat)**

**Nama Mahasiswa** : **Dina Andriana**

**NPM** : **12.851.0053**

**Program Study** : **Ilmu Pemerintahan**


Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. M. Husni Thamrin Nasution, M.Si

  
Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Mengetahui

  
Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Tanggal Lulus** : **19 September 2016**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Stabat pada tanggal 21 Juli 1984 dari Bapak Anwar dan Ibu Amnah, Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) di 050700 di Secanggang pada tahun 1997, dan SLTP Negeri 2 Stabat pada tahun 2000 dan SMU Negeri 1 Secanggang pada tahun 2003. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Pada Bulan Februari sampai Mei 2016 penulis melaksanakan penelitian skripsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Langkat dengan judul **“EVALUASI KERJA PROGRAMNASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2015 (Studi Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat”**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Perumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
2.1 Uraian Teori .....	9
2.1.a. Pengertian Monitoring.....	9
2.1.b. Fungsi Monitoring dan evaluasi.....	11
2.1.c. Pengertian Pinjaman.....	12
2.1.d. Pemantauan dan Pengawasan.....	13
2.1.e Audit dan Pemeriksaan keuangan.....	15
2.1.f. Pengertian Masyarakat.....	16
2.1.g Pengertian Sejahtera.....	17
2.1.h.Indikator Masyarakat Sejahtera.....	18
2.1.i Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan .....	21
2.1.j Dampak .....	23
2.1.j. Pengertian Kredit.....	23
2.1.k. Pengertian Kredit Macet.....	24

2.2	Kerangka Pemikiran .....	24
-----	--------------------------	----

**BAB III METODE PENELITIAN .....**

3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.2	Populasi dan Sampel .....	28
3.3	Tehnik Pengumpulan Data .....	28
3.4	Definisi Operasional Variabel .....	29
3.5	Analisa Data .....	31

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....**

4.1	Simpan Pinjam Perempuan (SPP) .....	32
4.2	Sasaran, Bentuk dan Ketentuan SPP .....	33
4.3	Dampak Program PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kelurahan Hinai Kiri .....	46
4.4	Faktor Penyebab Kredit Macet SPP Program PNPM MP di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang .....	50
4.5	Pengawasan Kelompok SPP .....	56
4.6	Metode Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi .....	57

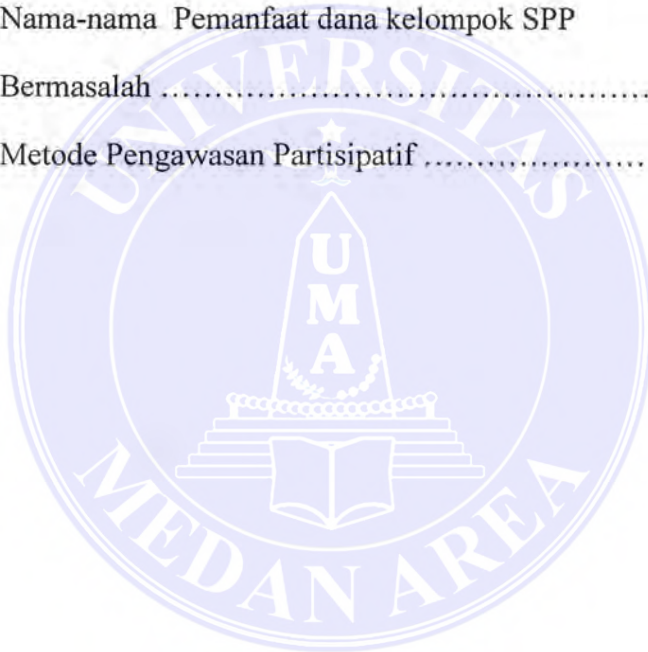
**BAB V PENUTUP .....**

5.1	Kesimpulan .....	59
5.2	Saran .....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Siklus manajemen Monitoring dan evaluasi.....	26
Tabel 2	Konseptualisasi dan Definisi Operasional .....	29
Tabel 3	Alur Tahapan Perguliran .....	46
Tabel 4	Aliran dana PNPM sejak Tahun 2007 .....	47
Tabel 5	Perkembangan pinjaman kelompok SPP .....	51
Tabel 6	Nama-nama Pemanfaat dana Kelompok SPP Berkembang.....	52
Tabel 7	Nama-nama Pemanfaat dana kelompok SPP Bermasalah .....	54
Tabel 8	Metode Pengawasan Partisipatif .....	57



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak lepas dari berbagai kesulitan dan hambatan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian tugas persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan.

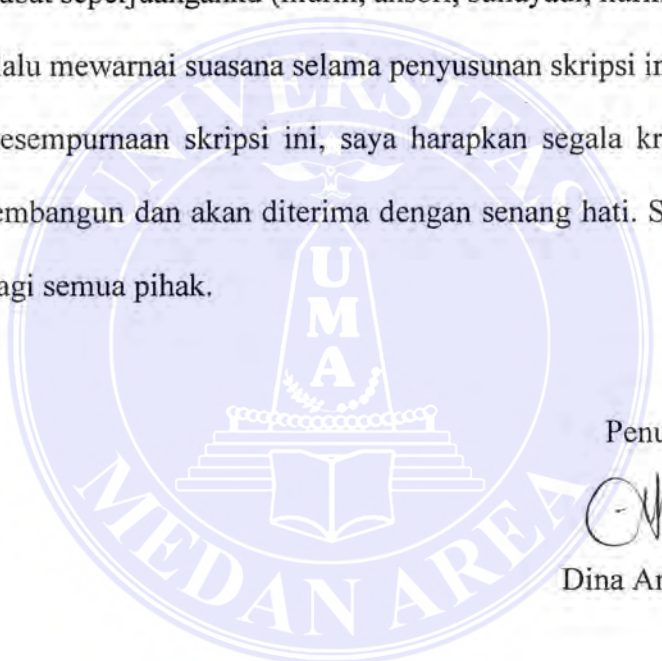
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, petunjuk dan sebagainya dari berbagai pihak, untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang M.A., selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memeberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H.M. Husni Thamrin Nst, M.Si, selaku dosen Pembimbing I.
3. Bapak Rudi Salam Sinaga,S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area dan selaku dosen pembimbing II.
4. Bapak Ir. Muhammad Mirza, selaku narasumber yang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Kepemerintahan yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti dan ilmu yang penulis terima akan penulis pergunakan dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Bobby Syaputra, selaku ketua UPK Kecamatan Secanggang yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian ini.



7. Bapak Amsalta Ginting, SE, sahabat yang selalu memberikan masukan dan pertimbangan selama penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga Kecilku yaitu suami dan anakku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan selama menyelesaikan pendidikan Sarjana ini.
9. Keluarga Besarku tercinta, terutama ibu dan ayahku tersayang, terima kasih atas segala dukungannya selama ini, semua menjadi lebih mudah dengan dukungan kalian.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku (murni, ansori, suliyadi, nuriman, riny, reni, dll) yang selalu mewarnai suasana selama penyusunan skripsi ini.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saya harapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan akan diterima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.



Penulia,

Dina Andriana

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Kemiskinan adalah fenomena yang bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang di Indonesia. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang selalu berkembang dan menjadi masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan karena substansi kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan dan papan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan.

Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat di tingkat pedesaan dengan memandirikan anggotanya (*Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri : 2007*). Program PNPM ini terdiri dari tiga program pokok yang sudah disusun oleh pemerintah pusat, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pembiayaan program ini berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan. Mekanisme berjalannya program ini sepenuhnya mengadopsi mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 1997 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pengendalian PNPM Mandiri Pedesaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

Program ini dalam pelaksanaannya memusatkan kegiatan bagi masyarakat paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan programnya seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif. Mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, hingga pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. (*Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri : 2007*)



Bentuk-bentuk kegiatan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Langkat adalah program Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) melalui berbagai penyuluhan, pelatihan, pembangunan fisik sarana dan prasarana, serta pemberian bantuan modal usaha melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang penyaluran dana yang diberikan kepada kelompok masyarakat di desa.

Dalam beberapa tahun ini PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang sudah banyak membantu kesulitan masyarakat, karena dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini masyarakat dapat merasakan jerih payah keringatnya. Kecamatan Secanggang adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Mayoritas penduduknya adalah suku melayu dan mereka kebanyakan bekerja sebagai petani. Kecamatan Secanggang memiliki luas  $\pm 223,27$  km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduknya  $\pm 63,820$  jiwa. Kecamatan Secanggang terdiri dari 16 desa dan 1 Kelurahan. Ibu kota Kecamatan Secanggang adalah Kelurahan Hinai Kiri. Kelurahan Hinai kiri adalah salah satu kelurahan yang mendapat dana bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program tersebut sudah banyak membantu perekonomian masyarakat Kelurahan hinai Kiri melalui bantuan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan, masyarakat didampingi tim fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan untuk memutar roda perekonomian dengan usaha ekonomi produktif.

Pengembangan ekonomi yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri sebagian besar pengembangan ekonomi konservatif. Artinya

bahwa masyarakat di Kelurahan tersebut sudah bisa memanfaatkan potensi yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya, inisiatif dan tenaga ahli lokal untuk membangun industri lokal baru yang akan dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut. Industri lokal yang ada di Kelurahan Hinai Kiri ada berbagai macam, yakni industri rumah tangga pangan dan industri panglong alat2 bangunan. Dalam industri rumah tangga pangan meliputi, usaha ekonomi produktif keripik pisang, telur bebek, rempeyek kacang, kue bawang dan lain-lain.

Hal tersebut menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi produktif telah dilakukan masyarakat lokal, dalam hal ini adalah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Di Kelurahan Hinai Kiri terdiri dari 20 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Hinai Kiri sangat Maju, tetapi dari 25 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut ada beberapa yang terjadi kemacetan dalam proses pengembalian pinjaman. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan memiliki kelebihan dan kelemahan di dalam pelaksanaannya. Seperti yang biasa terjadi dalam berbagai macam program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan program. Demikian juga dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Berdasarkan penelitian pra survei yang dilakukan peneliti, pada beberapa kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kelurahan Hinai Kiri, khususnya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) terjadi beberapa masalah yang timbul, antara lain keterlambatan dan ketidak tepatan



sasaran dari kegiatan kelompok simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sebagian masyarakat yang mendapat pinjaman modal tidak menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha, bahkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa terjadi ketidakstabilan dalam penggunaan dana pinjaman yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemberian pinjaman modal melalui kegiatan SPP tersebut sudah efektif dalam upayanya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Kelurahan Hnai Kiri adalah masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Seperti yang kita ketahui Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah salah satu program untuk penanggulangan kemiskinan dengan dana yang sangat besar. Tujuan utama dari program ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang mandiri, kreatif, serta mampu memanfaatkan potensi yang ada, baik SDA maupun SDM yang ada di wilayahnya, melalui berbagai macam usaha yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera. Maka berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas penulis mencoba untuk melakukan penelitian berjudul **“Evaluasi Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun 2015 (Studi Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kel. Hnai Kiri, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat).”**



## 1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat Tahun 2015?
2. Bagaimanakah pengaruh pinjaman modal kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM-MP terhadap Perkembangan usaha masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat?
3. Apakah penyebab terjadinya kredit macet pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program PNPM-MP di Kelurahan Hinai Kiri, Kec. Secanggang, Kab. Langkat?

## 1.3. PEMBATAAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, peneliti membatasi penelitian ini pada masalah bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti serta lebih terfokus dan mendalam.

#### 1.4. PERUMUSAN MASALAH

Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang diatas, maka untuk mempermudah proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pinjaman modal kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM-MP terhadap perkembangan usaha masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat?
2. Apakah penyebab terjadinya kredit macet pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program PNPM-MP di Kelurahan Hinai Kiri Kec. Secanggang, Kab. Langkat?

#### 1.5. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Pengaruh pinjaman modal kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM-MP terhadap perkembangan usaha masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
2. Penyebab terjadinya kredit macet pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program PNPM-MP di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

## 1.6. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji dan menelaah terhadap PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi dan pihak terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait (Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan Pengelola Program PNPM-MP Kelurahan Hinai Kiri) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan Program PNPM-MP di Kelurahan Hinai Kiri.



## BAB II URAIAN TEORITIS

### 2.1. URAIAN TEORI

#### 2.1.a. Pengertian Monitoring & Evaluasi

##### **Monitoring**

Monitoring merupakan pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan guna pengumpulan informasi mengenai apa sebenarnya yang terjadi selama proses implementasi atau penerapan program.

Tujuan monitoring :

1. Mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) telah dilaksanakan
2. Bagaimana kegiatan-kegiatan (termasuk Prosedur dan Mekanisme) dalam implementasinya dilakukan
3. Apakah rentang waktu (sesuai RKTL yang disusun) dalam implementasinya sudah terpenuhi secara tepat atau tidak
4. Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi sudah berjalan sesuai yang diharapkan

##### **Evaluasi**

Evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya suatu pendampingan yang dilaksanakan, apa sebab berhasil dan apa sebabnya gagal (mengidentifikasi yang dan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau pendampingan), serta bagaimana tindak lanjutnya. Jadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Kegiatan evaluasi senantiasa didasarkan atas hasil dari monitoring.

Tujuan evaluasi :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan yang telah disusun dalam RKTL
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (externalities)

(<http://agusthinminggu.blogspot.co.id/2011/10/monitoring-dan-evaluasi-pnpm-mpd.html>)

Secara prinsip monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya.

(Samuel S. Lusi, Monitoring dan Evaluasi :2015)

### 2.1.b. Fungsi Monitoring dan Evaluasi

Menurut Dunn (1981), Monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu

:

1. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.



Pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan :

- a. Menjaga setiap proses PNPM Mandiri Perdesaan selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan,
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
- e. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

### **2.1.c Pengertian Pinjaman**

Pinjaman dapat disamakan dengan kredit, Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2010:96)

Menurut Thomas Suyatno (2007:120) istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Karena itu, dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan berupa barang, uang atau jasa.

#### 2.1.d. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodic untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu : masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain.

Jenis kegiatan pemantauan dalam PNPM Mandiri Perdesaan meliputi :

a. Pemantauan dan pengawasan Partisipasi oleh Masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa. Semua kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat.

b. Pemantaun dan pengawasan oleh Pemerintah

Dana program merupakan dana public, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, memastikan dana tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semua jajaran pemerintah (DPRD, Tim Koordinasi dan Kabupaten, Bupati, Camat, PjOK).

c. Pemantauan oleh Konsultan

Pemantauan kegiatan program tentunya merupakan tanggung jawab bersama konsultan dan fasilitator di berbagai jenjang. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi :

- Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan.
- Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan.
- Pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan admisnistrasi.



- Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan.
- d. Pemantauan oleh pihak lain  
Pemantauan eksternal dilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan.

### **2.1.e. Audit dan Pemeriksaan Keuangan**

#### **1. Pemeriksaan Rutin**

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan atau Pendamping Lokal pada setiap kunjungan ke desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.

#### **2. Audit Internal**

Audit internal dilakukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, Manajemen Provinsi, dan KM-Nas. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana serta pengelolaan dana bergulir, termasuk didalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah.

### 3. Pemeriksaan Eksternal Struktural

Pemeriksaan structural akan secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP selaku auditor yang telah ditetapkan dalam *Loan Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (Bank Dunia).

#### 2.1.f. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “syaraka” yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Bahasa arab “musyaka” berarti saling bergaul sedangkan dalam bahasa inggris di kenal dengan istilah “society” yang berasal dari bahasa latin “socius” yang berarti kawan.

Menurut Koentjoroningrat (1990:142), Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau istilah ilmiah saling berinteraksi. Masyarakat adalah kesatuan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu identitas bersama. Istilah masyarakat biasanya untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, kelompok tersebut menekankan pada organisasi serta pimpinan dari kesatuan manusia.

### 2.1.g. Pengertian Sejahtera

Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita (1996:121) adalah 'aman, sentosa, dan makmur'. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.



### 2.1.h. Indikator Masyarakat Sejahtera

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya.

Adapun indikator kesejahteraan diantaranya adalah :

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu

meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

2. pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki



kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

3. kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya. (<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/17/indikator-kesejahteraan/>)



### 2.1.i. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Keadaan masyarakat (keluarga) yang serba kekurangan terjadi bukan karena

kehendak keluarga yang bersangkutan, tetapi karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga telah membuat mereka menjadi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. BKKBN (1996) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yaitu:

1. Faktor internal
  1. Kesakitan
  2. Kebodohan
  3. Ketidaktahuan
  4. Ketidakterampilan
  5. Keteringgalan teknologi
  6. Ketidakpunyaan modal
7. Faktor eksternal
  1. Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan.
  2. Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga.
  3. Kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan yang menyalahgunakan keluarga atau diri mereka sendiri.

4. Keluarga yang gagal adalah keluarga yang gagal kehilangan hampir semua energi karena permasalahan yang terjadi.
5. Keluarga penekan adalah keluarga yang tidak membebaskan para anggotanya untuk mengungkapkan perasaan secara spontan.
6. Keluarga yang berantakan adalah keluarga yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada waktu yang digunakan untuk bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain.
7. Keluarga yang “mandeg” adalah keluarga yang tidak sanggup dan khawatir untuk tumbuh sehingga tidak punya arah.
8. Keluarga yang dibuat-buat adalah keluarga yang terjadi karena menetapkan keputusan secara kolektif dan aktif untuk menghindari keputusan membentuk keluarga baru lagi.
  1. Keluarga yang terganggu adalah keluarga yang mengalami masa kritis.
  2. Keluarga yang terobsesi adalah keluarga yang memiliki komponen keluarga “mandeg” dan terganggu, sehingga tipe keluarga ini tidak berkembang.

3. Keluarga yang tumbuh adalah keluarga yang dapat bangkit kembali dan mampu menghadapi masalah baik dalam mengatasi krisis dan konflik yang ada.

### 2.1.j. Dampak

Pengertian secara umum, dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu (baik positif maupun negatif). Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum atau sesudah adanya “sesuatu”.

(J.S. Badudu :1994:306)

Dampak Sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan sesuatu kegiatan pembangunan disuatu wilayah atau area.

(Ng66.wordpress.com, posted in Untegorized on Juli 19 2010, “Analisa Dampak sosial”)

### 2.1.k. Pengertian Kredit

Menurut Dita Wisihartanti (2007:18) “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk



melunasi hutangnua setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Teguh Pudjo (2007:9) “pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani ‘*credere*” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahsa latin “*Creditum*” yang berate “kepercayaan akan kebenaran” dalam praktik sehari-hari “kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

### 2.1.1. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet atau *ploblem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.(Siamat, 1993: 220).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran.Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan structural, dan kesenjangan antar wilayah.Pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang

kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

PNPM yang merupakan kelanjutan dari PPK dalam masa transisi Tahun 2007, disebut sebagai PNPM-PPK. Kemudian mulai T.A. 2008, program ini disebut PNPM Mandiri Perdesaan, dengan beberapa perubahan dalam Tujuan, Prinsip, Kebijakan dan Prosedur. Dalam mencapai Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM

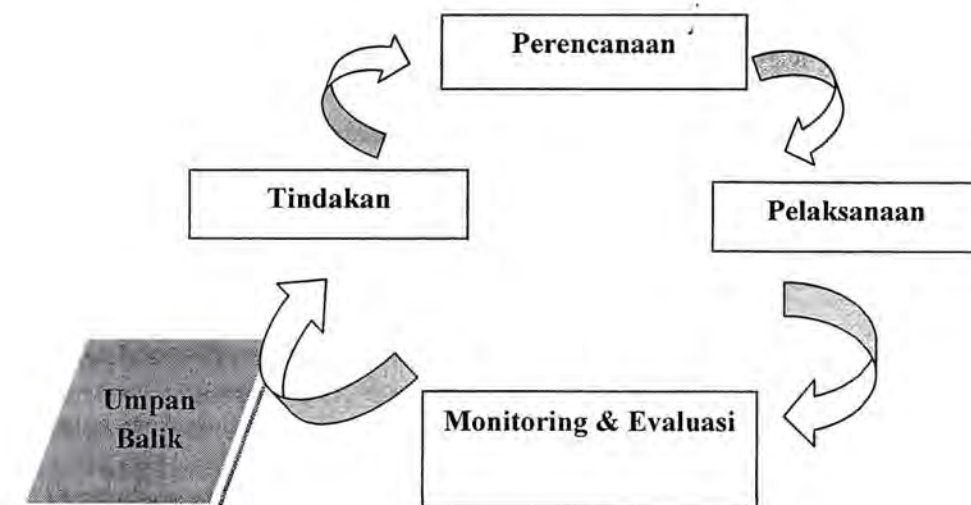
Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

Evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program.

Tabel 1. Siklus Manajemen Monitoring dan Evaluasi



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

##### b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu gejala, peristiwa, sifat populasi atau daerah tertentu.

##### c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Kecamatan Secanggang merupakan salah satu kecamatan yang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terbaik. Kelurahan Hinai Kiri dipilih menjadi lokasi penelitian karena Kelurahan ini merupakan ibu kota Kecamatan Secanggang dan mendapat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

#### d. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan kurang lebih 2 bulan.

### 3.2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditetapkan kesimpulannya. Dalam hal ini populasi yang digunakan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khususnya Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang dengan subjek Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai objek wawancara.

#### b. Sampel

Sampel adalah merupakan sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Berdasarkan pengertian di atas maka sampel penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga sebagai pemanfaat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

### 3.3. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ke lokasi

yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan.

b. Wawancara

Wawancara informasi merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan narasumber. Dalam proses wawancara interviewer mengajukan pertanyaan, baik dengan meminta penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan dan membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan kepadanya.

c. Tehnik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan telah didokumentasikan sehingga dapat digunakan oleh pihak lain yang akan melakukan penelitian.

**3.4. Konseptualisasi dan Definisi Operasional Variabel**

Tabel 2. Konseptualisasi dan Definisi Operasional

No	Aspek Penelitian	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Tehnik Pengumpulan data	Sumber Data
1	Pembentukan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Proses dibentuknya kumpulan dari beberapa perempuan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dana	- Jumlah kelompok SPP yang ada di Kel. Hinai Kiri - Proses pembentukan masing-masing kelompok	Wawancara Observasi	Kelompok SPP dan UPK



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota masing-masing kelompok</li> <li>- Jenis usaha masing-masing kelompok</li> </ul>		
2	Mekanisme Pemberian kredit dan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh kelompok SPP dalam menerima pinjaman dan mengelola pinjaman mulai dari tahap pengajuan pinjaman sampai pada tahap pengembalian pinjaman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajuan usulan pinjaman kelompok kepada UPK</li> <li>- Jumlah dana yang dipinjam masing-masing kelompok</li> <li>- Syarat dan ketentuan meminjam dana oleh anggota terhadap kelompok</li> <li>- Kondisi pengembalian pinjaman oleh masing-masing kelompok</li> </ul>	Wawancara observasi	Kelompok SPP, wali kampung, UPK dan Tim Verifikasi
3	Kemacetan anggota kelompok perempuan (SPP) dalam pengembalian pinjaman dana SPP	Tahap-tahapan yang harus dijalankan anggota SPP dalam proses kemacetan dalam pengembalian pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota kelompok yang mengalami kemacetan</li> <li>- Penyebab terjadinya kemacetan dalam pengembalian pinjaman SPP oleh anggota kelompok</li> </ul>	Wawancara Observasi	Anggota kelompok SPP yang mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman SPP
4	Pengaruh setelah adanya Program Simpan	Kemajuan-kemajuan yang ditimbulkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan yang dirasakan oleh para</li> </ul>	Wawancara Observasi	Anggota kelompok SPP, Masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

	Pinjam Perempuan (SPP) terhadap masyarakat	oleh Anggota SPP setelah mendapat pinjaman SPP	perempuan setelah mendapat pinjaman SPP - Kemudahan yang dirasakan oleh para suami yg istrinya mendapatkan pinjaman modal		kat, UPK
--	--	--	--	--	----------

### 3.5. Analisa Data

Analisis berarti menguraikan dan memisah-misahkan, menganalisis data berarti mengurai data atau menjelaskan data kemudian ditarik makna-makna dan kesimpulan

(Dudung Abdurahman:hal 65)

Data yang sudah berhasil dikumpulkan diklarifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis

(winarno Surakhmad :hal 134)

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan masalah dan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2015 (Studi Kasus Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sebagai mana telah diuraikan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan bagi masyarakat Kelurahan Hinai Kiri adalah pelaksanaan program dari, untuk dan oleh masyarakat yang mengacu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui program fisik, Program Peningkatan Hidup (PKH), dan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sesuai dengan visi dan misi Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Oleh karena itu pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan pasti mempunyai dampak bagi masyarakat penerima manfaat program pembangunan.
2. Dampak yang dirasakan masyarakat Kelurahan Hinai Kiri setelah adanya pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan, kini mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhannya dalam bidang sosial maupun bidang ekonomi. Dari segi pemenuhan kebutuhan bidang sosial,

Selain masyarakat, pemerintah dan swasta juga turut terlibat dalam pelaksanaan program sarana



sebagian besar dari mereka dapat memenuhi kebutuhannya karena didukung dengan sarana yang baik dari sebelumnya. Dan sebagian masyarakat dapat mengembangkan potensinya melalui usaha dengan didukung adanya pelatihan-pelatihan. Selain itu pemenuhan dalam bidang ekonomi, setelah masyarakat mengajukan bantuan pinjaman modal melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masyarakat dapat meningkatkan kewirausahaan khususnya perempuan. Mereka dapat membuat usaha kecil produktif, sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarganya dan tidak lagi bergantung kepada suami.

3. Akan tetapi tidak semua program Pemerintah itu berjalan seperti yang diharapkan. Karena setiap program pastilah memiliki kelemahan atau kekurangan. Masih ada sebagian masyarakat yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang masih menyalahgunakan program yang diberikan Pemerintah. Contohnya dalam Program Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Masih ada terjadi kemacetan didalam pengembalian pinjaman kelompok. Ketika mengajukan pinjaman modal mereka berusaha segala upaya untuk mendapatkan pinjaman, tetapi setelah pinjaman modal diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Karena mungkin sejak awal ketua kelompok memang berniat untuk tidak mengembalikan. Walaupun dengan resiko apapun. Dan ada juga kelompok yang kurang menguasai bidang usahanya, akibatnya usaha yang dibiayai dengan uang pinjaman

tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga terjadi kemacetan didalam pengembalian uang pinjaman modal.

## 5.2. SARAN

Demi kemajuan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Hinai Kiri dimasa yang akan datang, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kelurahan Hinai Kiri untuk dijadikan bahan pertimbangan:

1. Kepada Pemerintah Kelurahan Hinai Kiri agar dapat melakukan musyawarah bersama dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Secanggang terkait dengan terjadi tunggakan Pengembalian Pinjaman SPP yang ada di Kelurahan Hinai Kiri. Untuk menjaga keberlangsungan program barang jaminan bisa menjadi syarat peminjaman karena banyak dijumpai orang yang dapat mampu mengembalikan simpanan namun tidak mau melakukannya.
2. Kepada pemerintah Kelurahan Hinai Kiri agar dapat mengoptimalkan pendampingan saat pelatihan dan pengembangan usahayang dilakukan masyarakatnya.
3. Kepada Pemerintah kelurahan Hinai Kiri agar dapat membuka *showroom* untuk memasarkan hasil-hasil produk usaha industri rumah tangga pangan. Guna membantu pemasaran dan berkembangn usaha industri produktif masyarakatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Suharsini .1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Bineka Cipta

Zim merer:Thomas W & Noman M Scarborough & Dough Wilson :2008  
*Kewirausahaan & manajemen Usaha kecil Jakarta : Salemba empat*

Adi Sasmita.Rahardjo.2006. *Membangun Desa Partisipatif :Graha Ilmu Yogyakarta*

<http://sofyanhalim.blogspot.co.id/2009/03/kegiatan-simpan-pinjam-kelompok.html>

<https://bahagiamuddin.wordpress.com/2013/02/09/peran-kelompok-spp-pnpm/>

<http://agusthinminggu.blogspot.co.id/2011/10/monitoring-dan-evaluasi-pnpm-mpd.html>

Samuel S. Lusi. 2015. *Monitoring dan Evaluasi*

J.S. Badudu, *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1994

Kasmir, 2010. *Kewirausahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Dudung Abdurahman."Pengantar Metode Penelitian" hal.65

Surakhmad. Winarno.1982. "Pengantar penelitian Ilmiah:Tarsito"

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/17/indikator-kesejahteraan/>

Dita Wisihartanti (2007:18)

Teguh Pudjo (2007:9)

(Siamat, 1993: 220).

Tim Koorinasi PNPM Mandiri Perdesaan :*Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan dana PNPM-MP (2008:1)*

<http://wrihatnolo.blogspot.com/2008/08>, diakses 28 Maret 2016

[ng66.wordpress.com](http://ng66.wordpress.com).posted in Uncategorized on Juli 19 2010, "Analisa Dampak Sosial" (diakses tanggal 8 April 2016 pukul.08.45 Wib)

wawancara dengan Ketua Kelompok SPP Nurul Hikmah (Surtiwati :42 Thn )

UNIVERSITAS MEDAN AREA 2016

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23



Wawancara dengan Ketua Kelompok SPP Melati (Farida : 39 Thn) pada tanggal 17 Maret 2016

Wawancara dengan Fasilitator SPP PNPM-Mandiri Perdesaan (Dwi Mayastuti : 32 Thn) pada tanggal 11 Maret 2016

Wawancara anggota kelompok SPP (Kasini: 45) Hinai Kiri, 18 Maret 2016)

wawancara dengan Ketua UPK Kec. Secanggang (Bobby Syaputra: 32 Thn) Kel. Hinai Kiri tanggal 18 Maret 2016.

